

**KOMPLEKSITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI (Studi
Putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst)**

ABSTRAK

Aborsi masih menjadi problematika yang kerap terjadi di era sekarang ini, khususnya menimpa para generasi muda. Kurangnya pendidikan seks menjadi poin utama maraknya praktek aborsi ilegal yang secara tidak langsung merampas HAM dari korban aborsi tersebut, yakni jabang bayi yang digugurkan. Hal tersebut tentunya melanggar hukum serta agama. Dalam hal ini saya merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait penegakan hukum aborsi di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penegakan hukum para pelaku praktek aborsi ilegal di Indonesia hanya berlaku bagi tenaga kesehatan sedangkan pasien yang telah melakukan praktek aborsi hanya diberikan edukasi semata. Dalam hal tersebut kemudian memunculkan adanya pengecualian larangan aborsi, yakni pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan alasan indikasi darurat medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Namun dalam hal indikasi darurat medis terdapat pada Undang- Undang kesehatan tahun 2009 yang tidak memberikan penjelasan mengenai batasan atas keadaan darurat medis secara jelas. Hasil menunjukkan bahwa tindakan aborsi dilarang di Indonesia yang pengaturannya pada Pasal 346 KUHP - Pasal 349 KUHP dimana seseorang yang melakukan aborsi dengan sengaja dapat di pidana namun pada kondisi tertentu seorang perempuan juga dapat melakukan aborsi sesuai pada pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kata Kunci: Aborsi Ilegal, Kedudukan Pasien, Medis

**COMPLEXITY IN LAWN ENVIRONMENT TO WOMAN ABORTION
CRIME (DECISION STUDY NUMBER 406 / PID. Sus/2020/PN
JKT.Pst)**

ABSTRACT

Abortion is still a problem that often occurs in this era, especially for the younger generation. The lack of sex education is the main point of the rampant practice of illegal abortions which indirectly robs the human rights of the abortion victims, namely unborn babies who are aborted. This of course violates the law and religion. In this case, I feel interested in conducting research related to abortion law enforcement in Indonesia. The research method that I use in this writing is a normative juridical approach with statutory and case approaches. Law enforcement for perpetrators of illegal abortion practices in Indonesia only applies to health workers, while patients who have had abortions are only given education. In this case, there was an exception to the prohibition on abortion, namely Article 75 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 concerning Health, which states that abortion may be carried out on the grounds that it is an indication of a medical emergency and pregnancy as a result of rape. However, in terms of medical emergency indications, there is a Health Act of 2009 which does not provide a clear explanation regarding the boundaries of medical emergencies. The results show that the act of abortion is prohibited in Indonesia, which is regulated in Article 346 of the Criminal Code - Article 349 of the Criminal Code where a person who has an abortion intentionally can be criminalized, but under certain conditions a woman can also have an abortion in accordance with Article 75 of Law Number 36 of 2009 concerning Health.

Keyword: Illegal Abortion, Patient Position, Medical